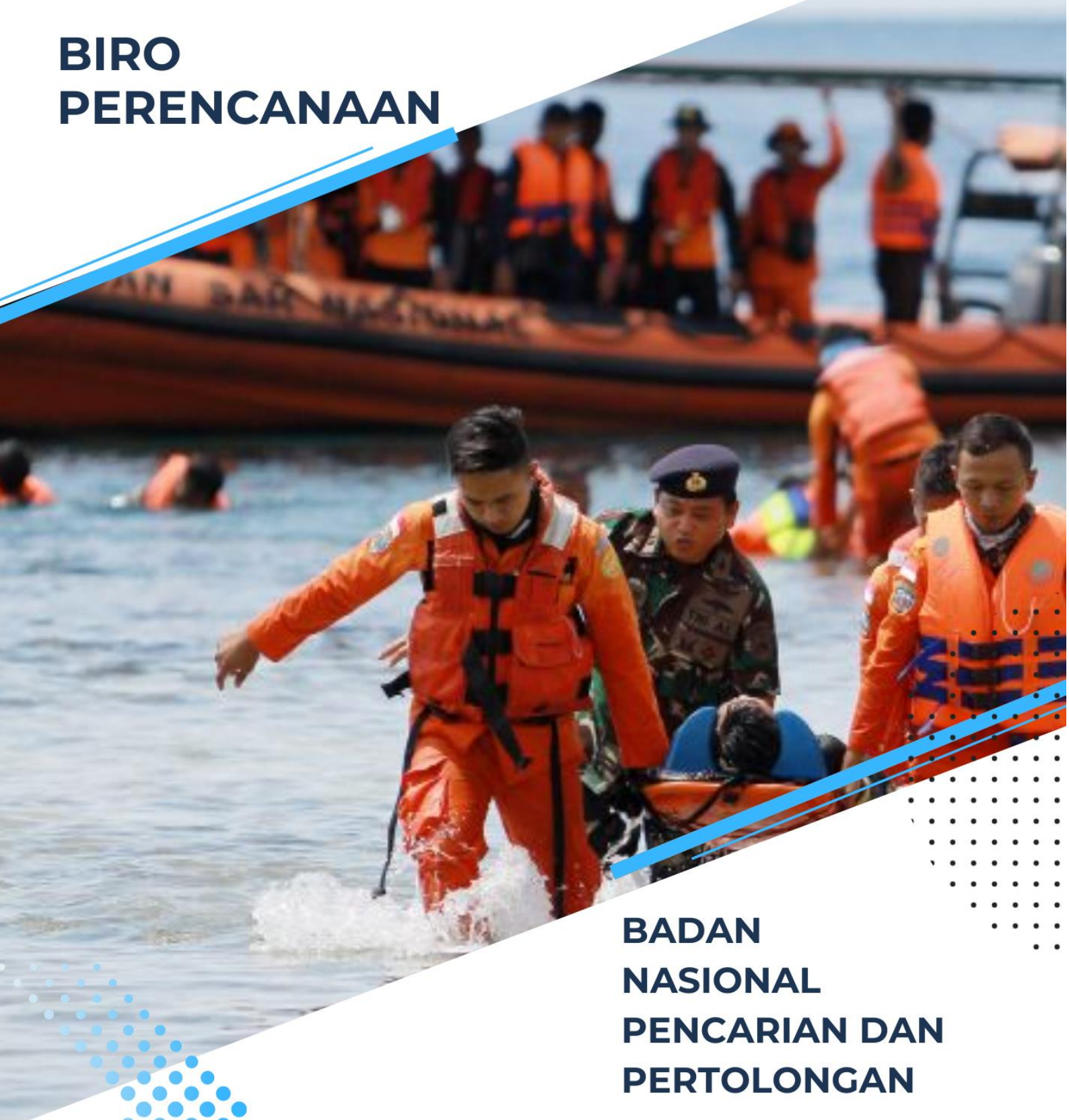


LAPORAN KINERJA

2022

BIRO PERENCANAAN



**BADAN
NASIONAL
PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi kerja sama di lingkungan Basarnas. Dalam mewujudkan pelaksanaan tugas tersebut, maka disusunlah laporan kinerja Biro Perencanaan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun 2022, Pemotongan Anggaran (*Automatic Adjustment*) Biro Perencanaan mencapai Rp3.499.168.000,- atau hampir 40% dari pagu Awal namun demikian secara garis besar capaian kinerja Biro Perencanaan dapat dikatakan sangat memuaskan atau dengan kategori AA dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 99,87%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100
SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	2. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73,00	68,38	93,67
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,5	72,86	103,35
	4. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,85	8,06	102,68
	5. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,33	99,29

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	6. Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%	100%	100
	7. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100
	8. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100
RATA RATA CAPAIAN				99,94

Dilihat dari evaluasi Indikator Kinerja dari tiap-tiap pelaksanaan sasaran yaitu yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja, maka tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan secara keseluruhan dapat dikatakan memuaskan, sehingga dimasa mendatang kiranya kondisi ini dapat dipertahankan dan bahkan jika mungkin ditingkatkan.

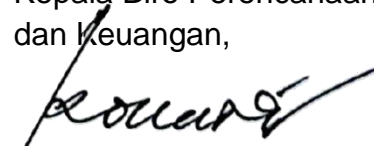
KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Tahun 2022 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu juga kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Kinerja ASN yang merupakan perubahan dari Permen PANRB Nomor 8 Tahun 2021.

Secara umum materi yang termuat dalam laporan ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Biro Perencanaan Basarnas selama Tahun 2022. Capaian kinerja Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian kinerja Biro Perencanaan. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan digunakan sebagai umpan balik perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Perencanaan secara berkelanjutan.

Jakarta, Februari 2023
Kepala Biro Perencanaan
dan Keuangan,



Roy Romanza. S.I.P
Marsekal Pertama TNI

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Kedudukan	2
2. Tugas	2
3. Fungsi	2
4. Struktur Organisasi	3
C. PERMASALAHAN UTAMA	4
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
1. Visi Biro Perencanaan	6
2. Misi Biro Perencanaan	6
3. Tujuan, Sasaran, Program Kerja dan Kegiatan Biro Perencanaan	7
4. Prosedur Pengumpulan Data.....	21
B. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. CAPAIAN KINERJA	25
B. PENGUKURAN KINERJA	26
1. Sasaran: Meningkatkan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan.....	26
a. Capaian.....	26

b. Analisis.....	37
2. Sasaran: Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	40
a. Capaian.....	40
b. Analisis.....	47
3. Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	53
a. Capaian.....	53
b. Analisis.....	57
C. REALISASI ANGGARAN	61
 BAB IV PENUTUP	 64
 A. KESIMPULAN	 64
B. CAPAIAN TERKAIT MANAJEMEN KINERJA ASN.....	64
C. TRANSFORMASI SKP,,,,,,,,,,,,,.....	65
D. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA	66
 DAFTAR PUSTAKA	 68

LAMPIRAN :

PENGUKURAN KINERJA SESUAI PERJANJIAN KINERJA 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Biro Perencanaan	4
Gambar 2.1.	<i>Cascading</i> Sasaran Strategis Biro Perencanaan	9
Gambar 2.2.	Prosedur Pengumpulan Data	15
Gambar 2.3.	<i>Cascading</i> Sasaran	16
Gambar 2.4.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2022.....	24
Gambar 3.1.	Peningkatan Nilai SAKIP dan RB.....	44
Gambar 4.1.	Katagori Manajemen Kinerja dan Implementasininya.....	..64
Gambar 4.2.	Impelementasi Penyusunan SKP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan dalam Penganggaran.....	10
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja dalam Renstra 2020-2024.....	11
Tabel 2.3.	Reviu Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan.....	13
Tabel 2.4.	Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja.....	14
Tabel 2.5.	Kegiatan (AKTIFITAS Program Kerja Dukungan Manajemen.....	14
Tabel 2.7	KRO Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).....	19
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Kepala Biro Perencanaan TA. 2022.....	23
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Biro Perencanaan	25
Tabel 3.2.	Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1).....	27
Tabel 3.3.	Kerjasama Dalam Negeri.....	28
Tabel 3.4.	Kerjasama Luar Negeri.....	34
Tabel 3.5.	Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1).....	37
Tabel 3.6.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1).....	38
Tabel 3.7.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1).....	38
Tabel 3.8.	Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK.2).....	40
Tabel 3.9.	Penilaian Kinerja UPT katagori Perencanaan dan Evaluasi.....	41
Tabel 3.10.	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemen PANRB.....	43
Tabel 3.11.	Hasil Evaluasi RB oleh Kemen PANRB.....	45
Tabel 3.12	Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2).....	47
Tabel 3.13.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2).....	47
Tabel 3.14.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2).....	49
Tabel 3.15.	Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3).....	53
Tabel 3.16.	Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3).....	56
Tabel 3.17.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3).....	57
Tabel 3.18.	Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3).....	58
Tabel 3.19.	Realisasi Anggaran Per Kegiatan / Aktivitas dalam Rencana Aksi.....	61

BAB I | PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Biro Perencanaan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro Perencanaan atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini juga merupakan ikhtisar kinerja yang meliputi nilai kinerja, realisasi anggaran, dan efisiensi kinerja. Nilai kinerja tersebut didapatkan pada rerata dari masing-masing capaian IKK (Indeks Kinerja Kegiatan) dalam bentuk persentase. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanjian kinerja Biro Perencanaan dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional melalui program Reformasi Birokrasi. Laporan kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 ini juga menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2022. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Perencanaan untuk meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Biro Perencanaan memiliki tantangan menjembatani kebijakan nasional di bidang perencanaan dengan kebutuhan Basarnas.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Program Prioritas Nasional tentang penyederhanaan birokrasi menuntut Basarnas untuk melaksanakan perubahan dan penyederhanaan birokrasi agar mampu menciptakan birokrasi yang dinamis sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima, mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), percepatan sistem kerja, serta mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Berdasarkan peraturan tersebut, kedudukan, tugas dan fungsi Biro Perencanaan adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Kedudukan

Biro Perencanaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Biro Perencanaan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan.

2. Tugas

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi kerja sama di lingkungan Basarnas.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana kinerja dan anggaran di lingkungan Basarnas;
- b. penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Basarnas;
- c. penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran Basarnas;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Basarnas;

- e. penyiapan penyusunan laporan rencana, program dan rencana anggaran di lingkungan Basarnas;
- f. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri; dan
- g. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Biro Perencanaan mengalami penyederhanaan, yang semula Kepala Biro Perencanaan dalam level Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) didukung oleh 3 Jabatan Administrasi (Eselon III) dan 6 Jabatan Pengawas (Eselon IV), setelah penyederhanaan birokrasi Kepala Biro Perencanaan didukung Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, yaitu:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rencana dan Program;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kerja Sama

Jumlah pegawai pada Biro Perencanaan berjumlah 31 pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Biro, 11 orang fungsional tertentu dan 18 Fungsional Umum. Struktur organisasi Biro Perencanaan digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 1.1. Struktur Organisasi Biro Perencanaan

C. PERMASALAHAN UTAMA

Beberapa permasalahan yang dihadapi Biro Perencanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Belum maksimalnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang perencanaan dan Manajemen Kinerja, terutama pada satuan kerja dan unit kerja.
2. Masih belum optimalnya budaya kerja dan *mindset* pegawai tentang perubahan dalam pekerjaan sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi, terkait pengalihan jabatan struktural ke fungsional.
3. Belum optimalnya sistem pelaporan dan evaluasi berbasis IT yang terpadu di lingkungan Basarnas.
4. Kurang intensitas koordinasi terkait usulan kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan dengan K/L atau organisasi serta negara tetangga.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja ini terdiri dari 4 Bab

1. Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Bab II Perencanaan Strategis memuat Peta Strategis Biro Perencanaan, ringkasan ikhtisar Renstra Biro Perencanaan, cascading dari Sasaran Program ke sasaran Kegiatan, Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan penjelasan terkait redesain Program dan menindaklanjutinya dengan penyusunan RO KRO serta kegiatan/aktivitas yang akan dijadikan rencana aksi
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja memuat:
 - A. Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja Biro Perencanaan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran startegis Biro Perencanaan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Biro Perencanaan.
 - B. Pengukuran Kinerja, bab ini menjelaskan tentang Analisis capaian Kinerja

C. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini menyajikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja

D. Kegiatan eksklusif di Biro Perencanaan di Tahun 2022

4. Bab IV Penutup memuat simpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Biro Perencanaan untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga membahas Capaian Kinerja terkait Manajemen Kinerja ASN dan Transformasi SKP
5. Lampiran memuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2022

BAB II | PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BIRO PERENCANAAN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mencakup tugas dan fungsi Biro Perencanaan selama periode tahun 2020-2024 yang memuat arah kebijakan dan strategis. Renstra Biro Perencanaan 2020-2024 selain dapat menjadi ukuran pencapaian kinerja Biro Perencanaan selama lima tahun juga dapat menjadi pedoman penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan di lingkungan Biro Perencanaan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing. Berikut visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Biro Perencanaan 2020-2024.

1. Visi Biro Perencanaan

Secara berjenjang, visi Biro Perencanaan juga mengacu terhadap visi Lembaga dan visi Sekretariat Utama. Visi Biro Perencanaan periode tahun 2020-2024 yaitu: **“Terwujudnya Biro Perencanaan yang profesional dalam perencanaan anggaran, evaluasi dan pelaporan serta kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung dalam mendukung visi Sekretaris Utama.”**

2. Misi Biro Perencanaan

Untuk mencapai visinya, Biro Perencanaan menetapkan 3 misi:

- M.1** Menyelenggarakan peningkatan penyelenggaraan kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan.
- M.2** Menyelenggarakan peningkatan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- M.3** Menyelenggarakan pelaksanaan perencanaan anggaran dan program kerja

3. Tujuan, Sasaran, Program Kerja dan Kegiatan Biro Perencanaan
Penjabaran pencapaian tujuan dan sasaran Biro Perencanaan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learning and growth perspective*, sasaran strategis Biro Perencanaan Tahun 2020-2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. *Stakeholder Perspective*

Dalam konteks ini, maka sasaran strategis (SS) Biro Perencanaan pada level *stakeholders perspectives* merepresentasikan pencapaian Tujuan Program (TP) dalam Rencana Strategis Basarnas Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada Sekretaris Utama untuk mewujudkannya, maka Tujuan Program (TP) terkait dengan program Dukungan Manajemen Basarnas adalah **TP5 Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas.**

b. *Customer Perspective*

Dalam konteks ini, maka sasaran Program (SP) Biro Perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level *Customers Perspectives* merepresentasikan pencapaian Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 yang ditugaskan oleh Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Perencanaan untuk mewujudkannya. Dalam hal ini, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, maka Sasaran Program (SP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan antara lain:

SP.11 Meningkatkan Kerjasama di Bidang Pencarian dan Pertolongan;

SP.12 Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas.

c. *Internal Business Process*

Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Biro Perencanaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan sesuai dengan struktur organisasi, sehingga dalam perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini ditetapkan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang menjadi tanggung jawab masing-masing Bagian di Lingkungan Biro Umum, *Internal Business Process* dapat dijabarkan sebagai berikut:

SK.1 Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan;

SK.2 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan;

SK.3 Sasaran kegiatan ketiga: Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga;

Dari masing-masing Sasaran kegiatan (SK) didukung oleh Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagaimana terlampir.

d. *Learn and Growth*

Perspektif *Learning and Growth* (LGP) ini merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari Biro Umum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam hal ini ditetapkan untuk perspektif *Learning and Growth* (LGP) antara lain: ASN yang profesional, Anggaran dan Teknologi informasi.

Dari keempat perspektif di atas, *Stakeholder Perspective* merupakan Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, **Customer Perspectives** ini merupakan Sasaran Program (SP) Sekretariat Utama, *Internal Business Process Perspectives* merupakan Sasaran Kegiatan (SK) Biro Perencanaan, dan *Learning and Growth Perspective* merupakan masukan (*input*) untuk mencapai sasaran kegiatan

Tujuan Program (TP) terkait dengan program Dukungan Manajemen Basarnas untuk Biro Perencanaan adalah **TP5 Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas**

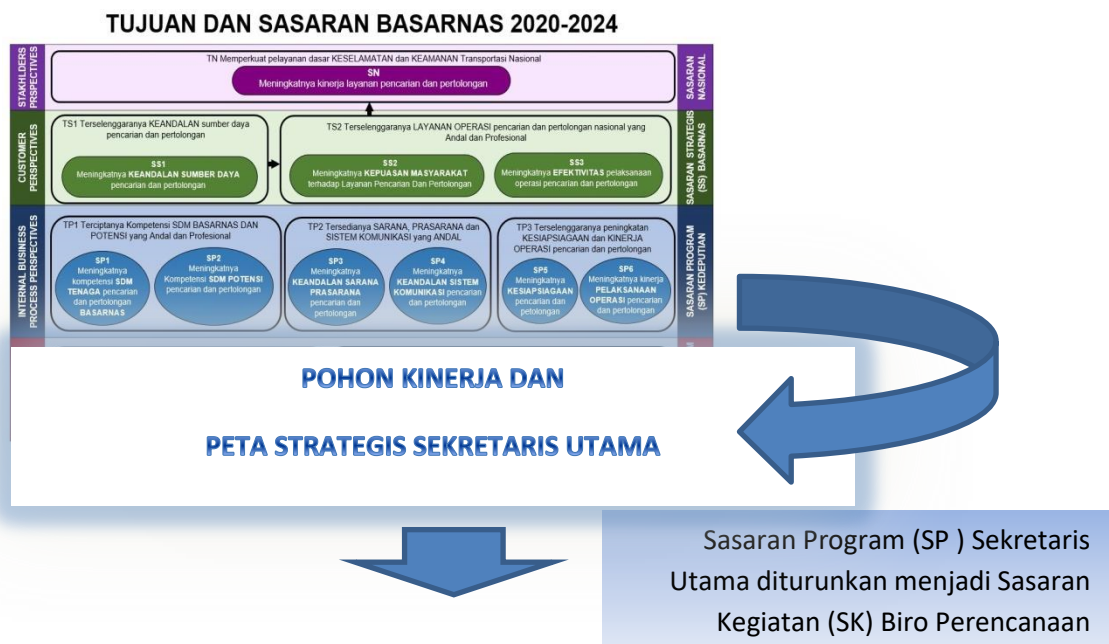
Sasaran Program (SP.11) sebelas **Meningkatkan Kerjasama di Bidang Pencarian dan Pertolongan** didukung oleh 1 Sasaran Kegiatan yaitu: SK.1 Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

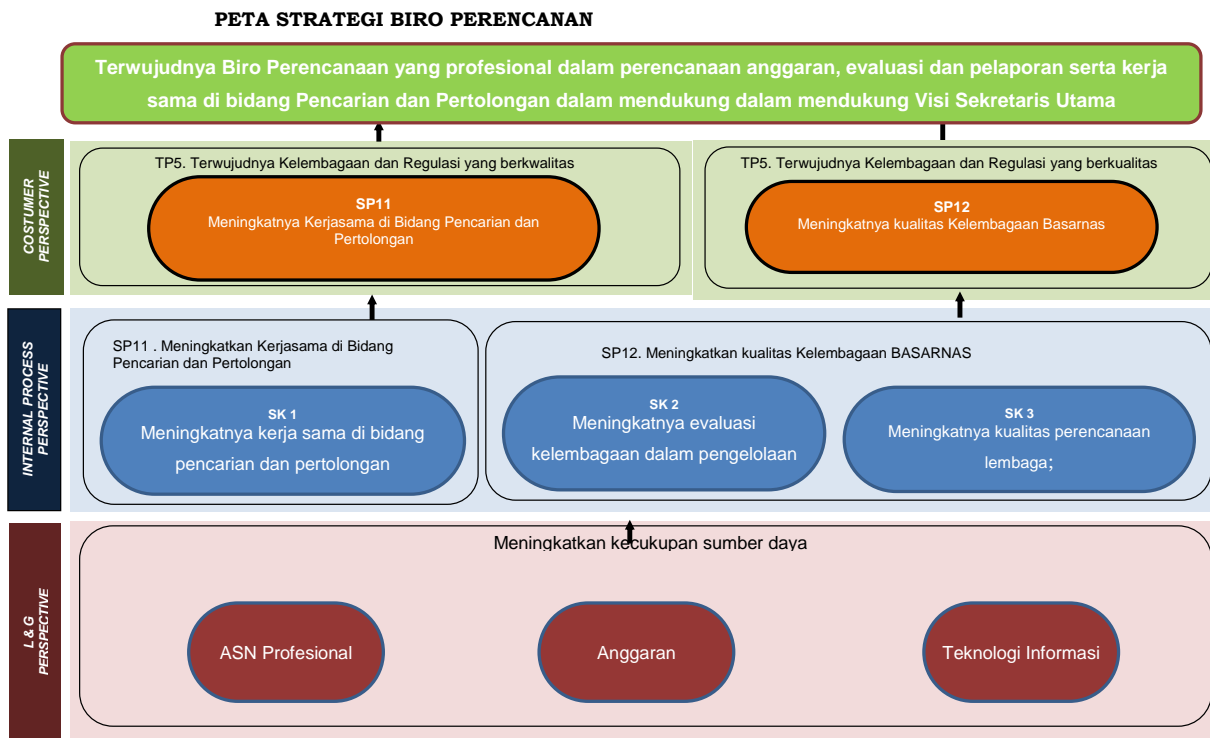
Sasaran Program (SP.12) keduabelas, **Meningkatnya kualitas kelembagaan Basarnas** di dukung oleh 2 Sasaran Kegiatan yaitu:

SK.2 Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan;

SK.3 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga

Pada Gambar 2.1 dibawah merupakan *cascading* Peta Strategis Biro Perencanaan. Sasaran tersebut diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Sekretaris Utama, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.





Gambar 2.1 *Cascading* Sasaran Strategis Biro Perencanaan

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program dan Kegiatan baik untuk kerangka kinerja maupun kerangka pendanaan telah tertuang di dalam Renstra Biro Perencanaan Tahun 2020-2024. Tabel berikut adalah indikator kinerja Biro Perencanaan, definisi dan rumus serta program kerja dan anggaran yang akan dibahas selanjutnya dalam laporan kinerja ini.

Tabel 2.1 Program, Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan dalam Penganggaran

	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, evaluasi pelaporan dan kerjasama	Layanan perencanaan dan penganggaran Internal Layanan Monitoring dan evaluasi internal
		Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
		Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Layanan Perkantoran Layanan Umum Layanan Kehumasan dan Protokoler Pengelolaan keuangan dan kinerja internal
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Layanan Sarana Internal Layanan Prasarana Internal

Tabel. 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Kinerja dalam Renstra 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas	SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase tingkat kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
	SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	2. Persentase satuan kerja yang menyampaikan dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai NSPK / persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada seluruh UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase pemantauan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94.00	94.00	95.00	95.00	95.00
	SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	5. Persentase pemenuhan target pendanaan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%	100%	100%

Pada Tahun 2022 Biro Perencanaan mereviu Indikator Kinerja dengan dasar:

1. Sesuai Surat Menteri PANRB Nomor B/22/M.AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021 Hal Rekomendasi Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS
3. Adanya Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 atas Perubahan Permen PANRB Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Salah satu rekomendasi hasil evaluasi AKIP adalah perlunya melakukan perbaikan atas indikator dalam upaya memenuhi indikator kinerja yang baik untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan dari unit tersebut. Biro Perencanaan melaksanakan asistensi kepada unit kerja Kantor Pusat untuk mereviu indikator kinerja beserta targetnya. Hasil reviu Indikator Kinerja dituangkan pada Surat Keputusan Kepala Basarnas Nomor SK. KBSN. 78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

Merespon terbitnya PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 Biro Perencanaan telah melaksanakan penetapan capaian kinerja organisasi sebagai dasar penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Capaian kinerja organisasi tersebut diperoleh dari nilai hasil evaluasi AKIP, capaian indikator kinerja, ekspektasi pimpinan, serta upaya perubahan proses/inovasi yang berdampak pada peningkatan hasil kerja unit kerja.



Reviu Indikator Kinerja Tahun 2022

Tabel 2.3. Reviu Indikator Kinerja Utama Biro Perencanaan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			
		SEMULA	MENJADI	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Regulasi dan Kelembagaan Yang Berkualitas	SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase tingkat kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%	100%
	SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	2. Persentase pemantauan pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	70	73	73,5	74
		3. Persentase satuan kerja yang menyampaikan dokumen SAKIP tepat waktu dan sesuai NSPK / persentase ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada seluruh UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,3	70,5	71,0	71,5
			4. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,5	7,8	8,0	8,2
		4. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	5. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	94,5	94,8	95
	SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	5. Persentase pemenuhan target pendanaan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	6. Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%	100%	100%	100%
		6. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	7. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%	100%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET			
		SEMULA	MENJADI	2021	2022	2023	2024
			8. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%	100%

Tabel. 2.4 Definisi dan Rumus Perhitungan Indikator Kinerja

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
SK. 11.1.1	Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	IKSK. 11.1.1.a	Persentase kerja sama di bidang SAR	%	Mengukur persentase jumlah penyusunan dokumen kerja sama SAR dibandingkan dengan jumlah kerja sama SAR yang direncanakan. $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen Kerjasama SAR}}{\text{Jumlah Dokumen Kerja sama SAR yang direncanakan}} \right) \times 100$
SK. 12.1.1	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	IKSK. 12.1.1.a	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	%	Mengukur nilai evaluasi berdasarkan matriks penilaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 12.1.1.b	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	Nilai	Mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja dari Kementerian PAN-RB
		IKSK. 12.1.1.c	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	Nilai	Mengukur nilai penguatan akuntabilitas kinerja dalam Evaluasi RB yang dinilai oleh Kementerian PAN-RB
		IKSK. 12.1.1.d	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	%	Mengukur penilaian kinerja anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
SK. 12.1.2	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKSK. 12.1.2.a	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	%	Mengukur persentase jumlah anggaran yang diblokir dalam DIPA $\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang diblokir}}{\text{Jumlah pagu anggaran pada DIPA}} \right) \times 100$
		IKSK. 12.1.2.b	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	%	Mengukur persentase jumlah unit kerja yang tepat waktu dalam menyampaikan data usulan rencana dan program $\% = \left(\frac{\text{Jumlah Unit kerja dan UPT yang tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh unit kerja dan UPT}} \right) \times 100$

Sasaran		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Penjelasan/ Rumus Perhitungan
		IKSK. 12.1.2.c	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	%	Mengukur persentase kesesuaian anggaran yang di peroleh dengan anggaran yang direncanakan $\% = \left(\frac{\text{Jumlah anggaran yang diperoleh}}{\text{Jumlah seluruh unit kerja dan UPT}} \right) \times 100$

Perubahan Indikator beserta Manual IKU yang tertuang dalam SK. KBSN Nomor. 78/PR.02.02/II/BSN-2022 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Manual Indikator Kinerja. Kegiatan/aktifitas dan langkah-langkah strategis dalam mendukung sasaran dan meningkatkan capaian kinerja Biro Perencanaan tertuang pada tabel berikut:

Tabel. 2.5. Kegiatan/aktivitas Biro Perencanaan pada Program Kerja Dukungan Manajemen:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN/ AKTIFITAS	VOLUME
1	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase tingkat kerjasama di bidang SAR (Utama)	Penyusunan dokumen Kerja Sama SAR	1 Dok
			Penyusunan juknis tentang kerja sama SAR	1 Dok
			Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR luar negeri	1 Dok
			Workshop kerja sama SAR luar negeri	1 Dok

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN/ AKTIFITAS	VOLUME
			Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri	1 Dok
			Workshop kerja sama SAR dalam negeri	1 Dok
2	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	2. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 3. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	1 Dok 1 Dok
		4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja 5. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	Penyusunan LAKIP dan Laporan Kinerja Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kinerja Rapat Kerja Basarnas	1 Dok 1 Dok 1 Dok
3	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	6. Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA 7. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam	Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan RKAKL Basarnas	1 Dok 1 Dok

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN/ AKTIFITAS	VOLUME
		menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	Sosialisasi penyusunan RKAKL	1 Dok
		8. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	Pembinaan Aparatur Perencanaan	1 Dok

Basarnas telah meredesain Sistem Perencanaan Penganggaran di tahun 2022.

Manfaat redesain sistem perencanaan dan penganggaran yaitu:

1. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, *output*, dan *outcome*
2. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon I dalam mencapai sasaran pembangunan
3. Terwujudnya efisiensi belanja Kementerian/Lembaga secara lebih optimal
4. Terwujudnya integrasi teknologi dan sistem informasi yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional
5. Terwujudnya penataan organisasi yang dapat mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja unit kerja di Kementerian Lembaga
6. Terwujudnya keterkaitan dan keselarasan antara Visi dan Misi Presiden dengan Fokus Pembangunan, 7 (tujuh) agenda pembangunan serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
7. Terciptanya rumusan nomenklatur program, kegiatan, dan keluaran (*output*) yang mencerminkan “*real work (eye catching)*”
8. Terwujudnya efisiensi dengan tidak adanya *overlapping* antar kegiatan dan output program

Tabel 2.6. Perubahan Program Basarnas

Semula	Menjadi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Dukungan Manajemen
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Basarnas	
Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

Setelah merumuskan Redesain Program, pada Tahun 2022 Basarnas melakukan tindakan lebih lanjut yaitu:

1. Merumuskan nomenklatur sasaran (*outcome*) program,
2. Sasaran (*outcome*) program mencerminkan hasil kinerja program yang ingin dicapai secara nasional,
3. Merumuskan Indikator Kinerja Utama Program,
4. Indikator kinerja program merupakan alat ukur untuk menilai capaian kinerja program dan rumusannya dapat bersifat kualitatif/kuantitatif,
5. Merumuskan nomenklatur output program,
6. *Output* program merupakan keluaran yang dihasilkan oleh K/L untuk terwujudnya *outcome*.

Penyusunan RO di Biro Perencanaan Basarnas

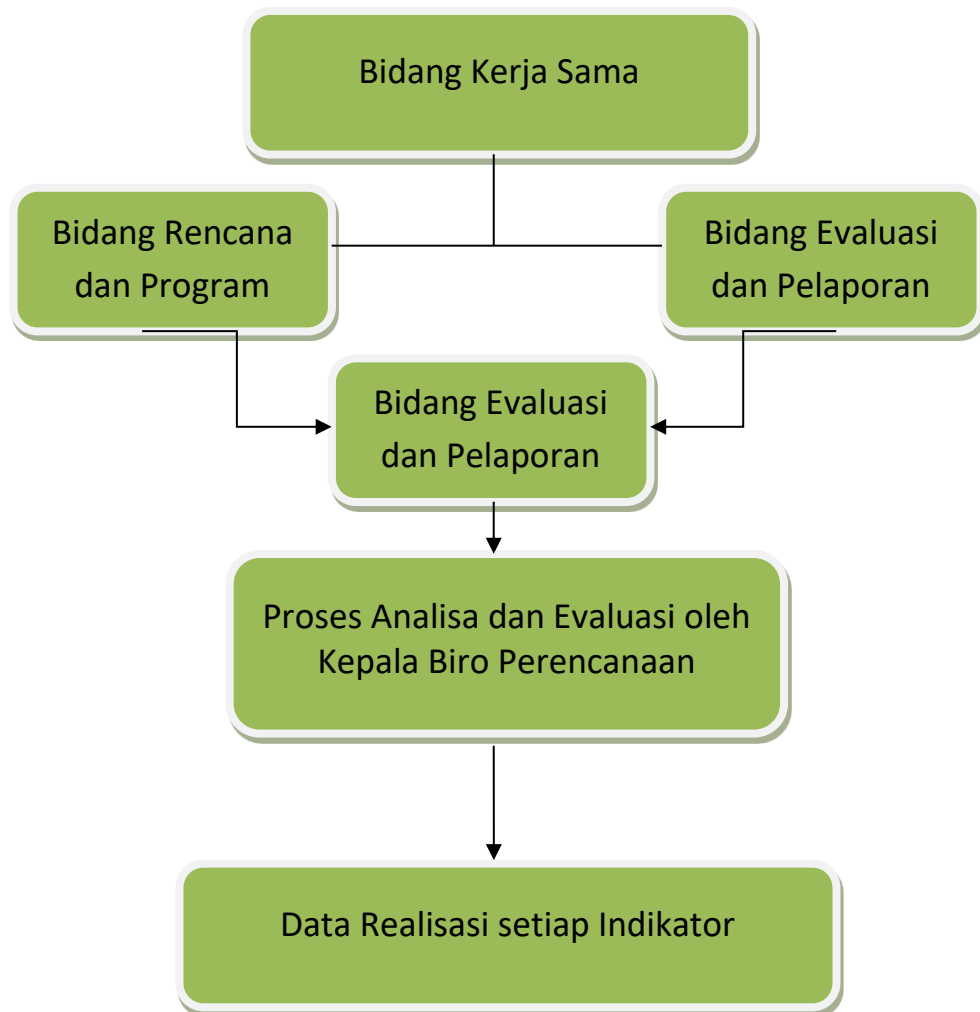
1. Tugas dan fungsi Biro Perencanaan serta tugas dan fungsi unit kerja pelaksana Kegiatan yang menghasilkan Keluaran (Output) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri terkait struktur organisasi dan tata kelola Kementerian/Lembaga
2. Peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Biro Perencanaan, peraturan lain terkait bidang/sector/tema program yang diampu oleh Biro Perencanaan.

Tabel 2.7 KRO Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Kegiatan	Semula (Output)	Menjadi (KRO)
Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Perencanaan (952)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran internal (EAB)
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi (953)	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (EAL)
	Layanan Kerja Sama (101)	Kerja Sama (AEC)
	Layanan Dukungan Manajemen Satker (970)	

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pencatatan dan pengumpulan data diperoleh dari masing-masing bidang di lingkungan Biro Perencanaan yaitu bidang kerja sama, bidang rencana dan program, serta bidang evaluasi dan pelaporan. Data-data tersebut kemudian dianalisa dan dievaluasi sehingga didapatkan data realisasi dari indikator yang telah ditetapkan. Prosedur pengumpulan data dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

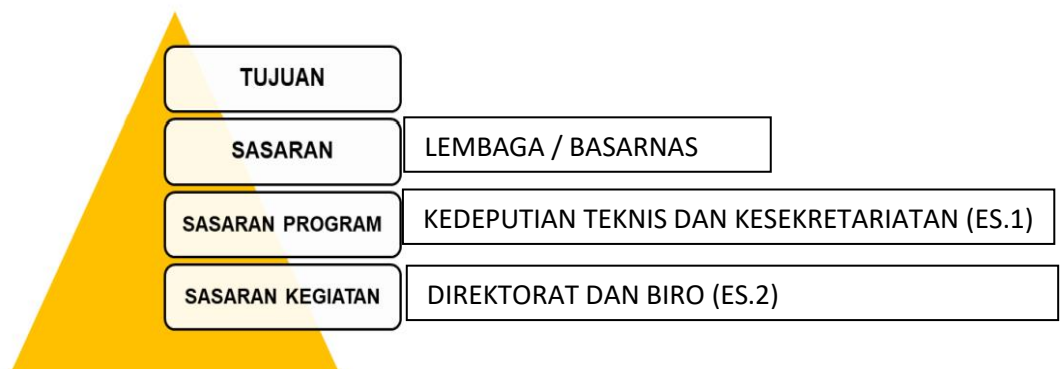


Gambar 2.2 Prosedur Pengumpulan Data

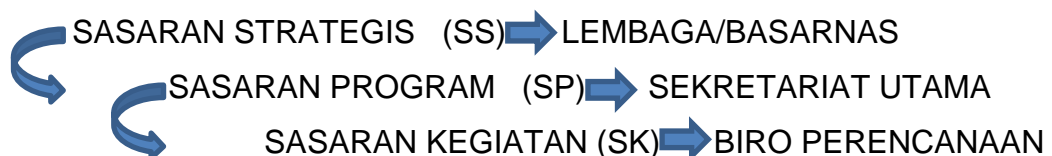
Basarnas mengembangkan **aplikasi e-Performance**, data-data Indikator Kinerja tertuang di dalam aplikasi dan pemantauannya serta pengendaliannya dilaksanakan setiap bulannya. Pada Tahun 2022, data *e-performance* telah dipakai sebagai evaluasi capaian kinerja organisasi sesuai PermenPANRB 6 Tahun 2022.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kerja dalam pelaksanaan tugas yang tertuang dalam Penetapan Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



Perjanjian Kinerja untuk pejabat dibawah Kepala Biro Perencanaan ini disusun secara berjenjang dan selaras dengan menggunakan *Balance Score Card* (Peta Strategis dan Pohon Kinerja) yang tertuang dalam Renstra Biro Perencanaan.



Gambar 2.3 Cascading Sasaran

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase tingkat kerja sama di bidang SAR	100%
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,5
	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,85
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%
	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%

Pada awal tahun Anggaran 2022, Biro Perencanaan mendapatkan Pagu awal sebesar Rp9.302.643.000,-

- a. Layanan Kerjasama dalam dan Luar Negeri Rp2.963.322.000,-
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp3.587.321.000,-
- c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp2.491.000.000,-



Gambar 2.4 Penandatanganan Perjanjian Kinerja 2022

Kepala Basarnas, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala UPT. Penandatanganan PK Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 bertepatan dengan Rakernas Basarnas Tahun 2022.

BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Biro Perencanaan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada TA 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA

Tingkat keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis diukur dari capaian kinerja suatu organisasi. Capaian kinerja organisasi dihitung berdasarkan keberhasilan Biro Perencanaan dalam merealisasikan Indikator Kinerja dari target yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dari pencapaian Indikator Kinerja tersebut difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, sedangkan Indikator Kinerja lainnya merupakan pendukung dari tercapainya IKU tersebut.

Secara garis besar rata-rata capaian kinerja pada IKU Biro Perencanaan sebesar 99,94%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Biro Perencanaan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%
SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	2. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73,00	68,38	93,67
	3. Nilai Akuntabilitas			

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,5	72,86	103,35
	4. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,85	8,06	102,68
	5. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,33	99,29
SK.3. Meningkatkan kualitas perencanaan lembaga	6. Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%	100%	100%
	7. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%
	8. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%
RATA RATA CAPAIAN				99,87%

B. PENGUKURAN KINERJA

Secara umum terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan yang merupakan turunan Sasaran Sekretaris Utama. Penjelasan terkait target kinerja, realisasi dan capaian untuk masing masing Sasaran Kegiatan yang ada di Biro Perencanaan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan”

a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu Persentase kerja sama di bidang SAR dan Persentase kerja sama di bidang SAR yang ditindaklanjuti. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%

Penjelasan dari indikator kinerja yang mendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing untuk menunjang tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral.

Pelaksanaan kerja sama dalam negeri tersebut diawali dengan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. MoU bisa juga disebut sebagai perjanjian pendahuluan yang memuat saling pengertian di antara para pihak sebelum perjanjian dibuat. Selanjutnya masing-masing instansi mempertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing yang kemudian diperkuat dengan Perjanjian Kerja Sama.

Berikut koordinasi dan kerja sama yang telah dilaksanakan Basarnas pada Tahun 2022:

1. Kerja Sama Dalam Negeri

Dalam rangka penyelenggaraan SAR, Basarnas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di dalam negeri. Pada Tahun 2022 telah dilaksanakan pembahasan kerja sama antara Basarnas dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Universitas, Rumah Sakit, BUMN dan Perusahaan. Berikut kerja sama dalam negeri yang telah ditandatangani oleh Basarnas dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Universitas, Rumah Sakit, BUMN dan Perusahaan pada tahun 2022:

Tabel 3.3 Kerjasama Dalam Negeri

No	Kerja Sama	Tanggal
1	Perjanjian Kerja Sama dengan PT. Pertamina Patra Niaga tentang Pembelian Bahan Bakar Minyak	31 Januari 2022
2	Perjanjian Kerja Sama dengan TNI AU tentang Penggunaan Sementara BMN TNI AU Berupa Tanah di Lanud Atang Sendjaja oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	31 Januari 2022
3	Nota Kesepahaman dengan Palang Merah Indonesia tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	23 Februari 2022
4	Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Sinergitas Sektor Kelautan dan Perikanan dalam rangka Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	23 Februari 2022
5	Nota Kesepahaman dengan RS Yarsi tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	23 Februari 2022
6	Nota Kesepahaman dengan PT ESRI tentang Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis dalam Bidang Pencarian dan Pertolongan	23 Februari 2022
No	Kerja Sama	Tanggal
7	Perjanjian Kerja Sama dengan PT ESRI tentang Hibah Lisensi Perangkat Lunak	4 Maret 2022
8	Nota Kesepahaman dengan Universitas Gadjah	23 Maret

2. K e r j a S a m a L u a r N e g e r i S		Mada tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	2022
	9	Nota Kesepahaman dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	8 Juni 2022
	10	Nota Kesepahaman dengan PT Pertamina Internasional Shipping tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan	22 Juni 2022
	11	Perjanjian Kerja Sama dengan PT Citraweb Solusi Teknologi tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi	27 Juli 2022
	12	Nota Kesepahaman dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan serta Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan	24 Agustus 2022
	13	Nota Kesepahaman dengan Universitas Budi Luhur tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	31 Agustus 2022
	14	Nota Kesepahaman dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik	20 Oktober 2022

ebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, guna menunjang tugas dan fungsinya Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang SAR dan/atau negara asing. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral.

1) Kerja Sama Bilateral

Basarnas telah membuat naskah kerja sama dengan berbagai otoritas SAR negara-negara lain dalam bentuk *Memorandum of*

Understanding (MoU) dan SAR arrangement. Kerja sama tersebut antara lain dilaksanakan dengan, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Sri Lanka, RRT, Korea, dan Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pada Tahun 2022 dilaksanakan kegiatan kerja sama sebagaimana penjelasan di bawah ini.

1) Kerja Sama Indonesia-Australia

Kerja sama Indonesia-Australia adalah kerja sama antara Basarnas dengan Australian Maritime Safety Authority (AMSA), kerja sama ini berada dalam kerangka kerja sama Indonesia *Transport Safety Assistance Package (ITSAP)* yang dipayungi oleh PROPERA yang berada dibawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket bantuan ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah:

- *Intensive English Course*
- *AMSA-Basarnas SAR Forum*
- Workshop Penyusunan Naskah Perjanjian Bilateral Indonesia-Australia bidang Pencarian dan Pertolongan.
- Kunjungan Kerja Kepala Basarnas ke Australia sebagai bagian dari program Senior Officials Visit tahun ITSAP tahun 2022 pada awal Desember 2022. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang tertunda dari tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pada kunjungan tersebut KaBasarnas melakukan rangkaian kunjungan dan diskusi ke AMSA sekaligus meninjau *Operasional Room dari Rescue Coordination Center (RCC)* Australia di Canberra, meninjau pesawat SAR AMSA bertipe Challenger dari Bombardier sekaligus berdiskusi dengan awak kabin terkait kemampuan pesawat dan teknologi pendukung SAR di dalamnya. Pada kunjungan tersebut

KaBasarnas juga melakukan diskusi tatap muka dengan perwakilan *Australian Maritime Border Command* sebagai salah satu instansi pendukung pelaksanaan operasi SAR di Australia di bawah koordinasi AMSA.

2) Kerja Sama Indonesia - Singapura

LOCA on Search and Rescue antara Kementerian Perhubungan, Basarnas dan Ministry Transport Singapore, Civil Aviation Authority of Singapore telah ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada bulan Januari 2022 sebagai bagian dari proses Flight Information Region (FIR) Realignment antara Pemerintah Indonesia dan Singapura.

Terdapat pula pembahasan tentang penyusunan naskah MoU antara Basarnas dan Singapore Civil Defense Force (SCDF) dengan hasil naskah tersebut telah disepakati kedua pihak untuk ditandatangani pada tahun 2023.

2) Kerja Sama Regional

1) ASEAN Transport SAR Forum ke-9

ASEAN Transport SAR Forum (ATSF) merupakan forum otoritas SAR penerbangan dan pelayaran di ASEAN yang dibentuk sebagai tindak lanjut pertemuan ASEAN SAR Expert Group Meeting di Yangon, Myanmar pada tanggal 16-17 Oktober 2012. Forum ini diprakarsai oleh Basarnas. Dalam pertemuan tersebut para menteri transportasi ASEAN bersepakat untuk mengintensifkan kerja sama SAR untuk mendukung sektor transportasi. Forum ini menyelenggarakan pertemuan secara berkala setiap tahun bertempat di negara yang menjadi Sekretaris ASEAN. Kegiatan yang dilaksanakan pada forum ini antara lain adalah pertemuan tahunan ATSF, penyusunan *ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue*, penyusunan *Search and Rescue Operational Procedure*, latihan bersama ATSF yang

sementara ini dilaksanakan dalam bentuk latihan posko dan pelatihan SAR.

Pertemuan ATSF ke-9 ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 15 Maret 2022 mengingat keadaan pandemi akibat wabah covid-19 dengan Brunei Darussalam sebagai tuan rumah pertemuan. Adapun hasil dari pertemuan tersebut seluruh negara anggota ASEAN sepakat untuk menandatangani *ASEAN Agreement on Aeronautical and Maritime Search and Rescue* pada tahun 2022 ini.

2) IORA (*Indian Ocean Rim Association*)

IORA adalah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di wilayah Samudera Hindia. Organisasi ini dibentuk karena melihat adanya berbagai tantangan di kawasan Samudera Hindia, maka diperlukan kerja sama untuk menjaga stabilitas keamanan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi (perdagangan dan investasi). Nilai penting organisasi ini bagi Indonesia adalah:

- ✓ Memperluas pengaruh dan memperkuat posisi tawar Indonesia di kawasan Samudera Hindia sebagai *new growth center* di kawasan.
- ✓ Mengatasi berbagai tantangan yang muncul di Samudera Hindia seperti *maritime safety and security, illicit drug trafficking, people smuggling, Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, piracy, economic growth, dan climate change*.
- ✓ Merupakan organisasi kerja sama maritim yang komprehensif guna mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sesuai visi Nawa Cita Presiden RI.
- ✓ Indonesia menjadi ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) untuk periode 2015-2017

Pada tanggal 5 s.d. 9 September 2022, Basarnas menjadi peserta pada pertemuan IORA Workshop on *Maritime Assistance and Search and Rescue* di Bangladesh.

3) Kerja Sama Organisasi Internasional

Sebagai otoritas SAR di Indonesia, Basarnas berperan aktif mengikuti kegiatan organisasi-organisasi internasional terkait di bidang penerbangan, pelayaran, pemanfaatan satelit SAR dan *urban SAR*. Kegiatan kerja sama Basarnas pada organisasi-organisasi tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1) *International Civil Aviation Organization* (ICAO)

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota ICAO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai instansi penjurur. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Basarnas antara lain berupa:

- Tahun 2022 pertemuan ICAO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas secara virtual antara lain adalah The Sixth Meeting of the Asia/Pacific Regional Search and rescue Work Group (APSAR/WG/7) pada tanggal 23 s.d 27 Mei 2022.
- Sesuai dengan pelaksanaan The Seventh Meeting of the Asia/Pacific Regional Search and Rescue Work Group (APSAR/WG/7) dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 1. The Seventh Meeting of The Asia/Pacific Regional Search and Rescue Work Group (APSAR/WG/7) telah terselenggara dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda item yang ditentukan. Rapat diikuti oleh 112 peserta yang berasal dari 27 negara, dan 3 organisasi internasional;

2. Peningkatan system operation dari Cospas-Sarsat ke depan berfokus pada penyempurnaan dan peningkatan spesifikasi teknis dari fasilitas MEOSAR Satellite, Emergency Locator Transmitter – Distress Tracking (ELT-DT), dan Return Link Services (RLS).
3. Implementasi Autonomous Distress Tracking (ADT) berlaku 1 Januari 2023. Implementasi ini memerlukan waktu untuk memastikan SOP Koordinasi ketika terjadi real distress antara Aeronautical RCC, Maritime RCC, dan Joint Rescue Coordination Centre. ADT pada saat aktivasi dapat melintasi beberapa Flight Information Region (FIR) dan Search and Rescue Region (SRR). Pada quarter 4 tahun 2022 akan ada beberapa pesawat yang dilengkapi dengan system Autonomous Distress Tracking ADT agar setiap negara mempersiapkan aturan dan SOP penanganan distress alert dan ELT generasi kedua.
4. Negara-negara anggota ICAO diharapkan dapat menyampaikan Proposal for Amandement (PfA) tentang batas Search and Rescue Region (SRR) kepada ICAO paling lambat di bulan Oktober 2022;
5. Untuk saat ini Indonesia telah memenuhi Regional SAR Performance Indicator dengan nilai 95% peringkat 4 dari 42 negara anggota.
6. Kegiatan workshop tentang implementasi Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) berjalan lancar.

✓ International Maritime Organization (IMO)

Kegiatan Basarnas dalam otoritas ini untuk mendukung Indonesia sebagai anggota IMO dengan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai

instansi penjurur. Selama Tahun 2022 pertemuan IMO yang dihadiri oleh perwakilan Basarnas secara virtual antara lain adalah:

Tabel 3.4 Kerjasama Luar Negeri

No.	Pertemuan	Tanggal
1.	Sidang Sub Komite IMO - III	25 s.d. 29 Juli 2022
2.	MSC 106	2 s.d. 11 November 2022
3.	<i>Sub-Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR-9)</i>	21 s.d. 30 Juni 2022

✓ International COSPAS-SARSAT Programme

COSPAS singkatan dari bahasa Rusia yaitu *Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov* (sistem pencarian luar angkasa untuk kapal yang mengalami keadaan darurat) sedangkan SARSAT singkatan dari *Search and Rescue Satellite Aided Tracking*. Organisasi ini merupakan organisasi internasional di bidang pemanfaatan satelit untuk mendukung penyelenggaraan SAR yang beranggotakan 45 negara pemilik stasiun bumi atau *Local User Terminal (LUT)* dan pengelola satelit SAR.

✓ *International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG)*

INSARAG merupakan suatu jaringan global yang terdiri lebih dari 90 negara dan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) khususnya di bawah koordinasi *United Nation Office for Coordination and Humanitarian Affairs (UN-OCHA)*. INSARAG memiliki tujuan untuk menetapkan standar dan metodologi koordinasi bagi Tim *Urban Search and Rescue (USAR)* Internasional. Pendirian organisasi ini didukung dengan Resolusi Sidang Umum PBB 57/150 tahun 2002

tentang *Strengthening the Effectiveness and Coordination of International Urban Search and Rescue Assistance*.

Basarnas sebagai anggota INASAR yang aktif telah membentuk *Indonesia Search and Rescue (INASAR) Team*, yang memperoleh dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan berbagai Kementerian dan Lembaga lainnya. Tim INASAR merupakan tim yang dibentuk untuk melaksanakan operasi SAR pada reruntuhan bangunan yang disebabkan oleh gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor dan bencana lainnya. Pada tanggal 26 s.d. 29 November 2019 Tim INASAR telah berhasil mengikuti *INSARAG External Classification (IEC)* dan dinyatakan lulus sebagai *INSARAG-Medium USAR Team*.

Basarnas juga merencanakan untuk meningkatkan klasifikasi tim INASAR dari klasifikasi *Medium* ke *Heavy USAR Team* pada tahun 2023. Secara bersamaan, Basarnas akan membentuk tim *Urban SAR* di berbagai wilayah di Indonesia melalui program akreditasi nasional. Tujuan pembentukan tim tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan tim SAR di berbagai daerah dan mempercepat waktu tanggap serta kualitas pelaksanaan operasi SAR terutama di wilayah yang rawan bencana.

Pada tahun 2022 Basarnas berhasil menyelenggarakan *INSARAG Asia Pacific Regional Earthquake Response Exercise* yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 9 September 2022 di Denpasar Bali.

Basarnas juga berpartisipasi aktif pada pertemuan *Humanitarian Network and Partnership Week (HNPW) 2022* di Jenewa, Swiss pada bulan Mei 2022, *INSARAG Recognize National Accreditation Process* pada tanggal 16 s.d. 19 Juni 2022 di Cyprus dan

menghadiri INSARAG Asia Pacific Regional Meeting 2022 pada bulan November 2022 di Seoul, Korea Selatan

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.5 Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai target.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Basarnas dapat bekerja sama dengan pemerintah negara lain, lembaga atau organisasi internasional di bidang pencarian dan pertolongan dan/atau warga negara asing untuk menunjang tugas dan fungsinya. Sejalan dengan hal tersebut, Basarnas mempunyai tugas dalam penyiapan koordinasi kerja sama dan bantuan luar negeri, penyusunan kerja sama dan bantuan luar negeri serta penyusunan laporan rencana dan program kerja sama dan bantuan luar negeri. Kerja sama tersebut di atas mencakup kegiatan kerja sama teknis operasional dan bantuan luar negeri melalui kerja sama secara bilateral, regional maupun multilateral

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kerja sama di bidang SAR	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan telah mencapai targetnya serta tidak mengalami penurunan maupun kenaikan.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 1 (SK1)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kerja sama di bidang SAR	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	-	-
	2024	100%	-	-

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan. Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan untuk Tahun 2022 target telah tercapai. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
- Adanya koordinasi Basarnas dengan organisasi atau instansi lain baik dalam maupun luar negeri sehingga tercapai kerja sama yang baik
 - Peran aktif Basarnas dalam kegiatan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan
 - Menjaga hubungan baik dengan Mitra merupakan bagian dari langkah Kerjasama, selain menjaga hubungan baik, Basarnas juga membangun Kerjasama dengan Mitra dalam rangka tugas pokok Pencarian dan Pertolongan
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Selama Tahun 2022 Biro Perencanaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
- Keterlibatan Pimpinan dalam melaksanakan Koordinasi yang efektif dan efisien.
 - Pembinaan Sumber Daya Manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment di Biro Perencanaan dan Kerjasama.
 - Terwujudnya Kemampuan Manajerial dan Sumber Daya yang Berkualitas.
 - Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Pemanfaatan media Zoom dan Teleconference juga sangat membantu Pelaksanaan Kegiatan koordinasi Kerjasama
- Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.
- Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Anggaran Biro Perencanaan dan Kerjasama masuk dala Program Dukungan Manajemen. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan adalah Penyusunan dokumen Kerja Sama SAR, Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR luar negeri, Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri, workshop kerja sama SAR dalam negeri, Penyusunan Juknis tentang Kerja sama SAR, Penyelenggaraan Regional Meeting (INSARAG), workshop Kerja Sama SAR Luar Negeri
- Adanya *Automatic Adjustment* (pemotongan) di Bagian Kerjasama sebesar Rp.1.578.619.000,-

2. Sasaran kedua yaitu “Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan”

a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 4 indikator kinerja, yaitu Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja, Nilai penguatan akuntabilitas kinerja, serta ilai atas evaluasi kinerja anggaran. Adapun capaian indicator untuk sasaran 2 tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK.2)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya evaluasi	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan	73,00	68,38	93,67

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan			
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,5	72,86	103,35
	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,85	8,06	102,68
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,33	99,29

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan” didukung oleh Indikator Kinerja sebagai berikut:

1) Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Pengukuran indikator ini dihitung dari rata-rata hasil penilaian kinerja UPT Kategori Perencanaan dan Evaluasi. Penilaian kinerja UPT untuk kategori tersebut terdiri dari:

a) Penilaian dokumen SAKIP dan aplikasi pemantauan kinerja

- Dokumen Renstra
- Dokumen Perjanjian Kinerja
- Dokumen Rencana Aksi
- Laporan Kinerja
- Aplikasi Simonev/Laporan Bulanan
- Aplikasi *e-Performance*
- Aplikasi Smart-DJA
- Aplikasi eMoney Bappenas

b) Penilaian pengajuan RKA-KL

- Kesesuaian pengusulan anggaran dengan Renstra UPT
- Ketepatan waktu pengajuan RKA-KL
- Kelengkapan TOR, RAB dan data dukung

Berikut rekap hasil penilaian kinerja UPT untuk Kategori Perencanaan dan Evaluasi:

Tabel 3.9 Penilaian Kinerja UPT katagori Perencanaan dan Evaluasi

No.	UPT Kelas A			Rata rata pembobotan
		Evaluasi Pelaporan	Perencanaan Program	
1	Balai Diklat	60,15	49,00	56,81
2	Banda Aceh	77,99	67,00	74,69
3	Medan	71,33	65,50	69,58
4	Padang	72,89	60,00	69,02
5	Pekanbaru	78,10	65,00	74,17
6	Tanjung Pinang	74,29	64,50	71,35
7	Lampung	73,38	66,50	71,32
8	Jakarta	75,77	66,00	72,84
9	Bandung	77,16	65,00	73,51
10	Semarang	74,30	66,00	71,81
11	Surabaya	55,03	65,00	58,02
12	Denpasar	74,43	67,00	72,20
13	Mataram	69,97	65,00	68,48
14	Kupang	79,04	65,00	74,83
15	Balikpapan	72,83	66,00	70,78
16	Pontianak	76,16	70,00	74,31
17	Makassar	75,40	67,00	72,88
18	Kendari	69,91	66,50	68,89
19	Manado	74,72	66,50	72,25
20	Ambon	71,10	66,00	69,57
21	Biak	76,26	57,00	70,48
22	Sorong	58,20	56,00	57,54
23	Jayapura	72,26	65,00	70,08
No	UPT Kelas B			
1	Nias	48,10	59,50	51,52
2	Mentawai	71,69	55,00	66,68
3	Jambi	74,02	73,00	73,71
4	Natuna	71,07	61,00	68,05
5	Pangkalpinang	75,10	65,00	72,07
6	Palembang	78,61	66,50	74,98
7	Bengkulu	78,13	65,00	74,19
8	Banten	73,33	66,00	71,13
9	Cilacap	69,80	66,00	68,66
10	Yogyakarta	74,80	65,00	71,86

No.	UPT Kelas A			Rata rata pembobotan
		Evaluasi Pelaporan	Perencanaan Program	
11	Banjarmasin	78,55	67,00	75,09
12	Palangkaraya	71,51	67,00	70,16
13	Tarakan	74,30	66,00	71,81
14	Maumere	77,51	67,00	74,36
15	Mamuju	48,15	65,00	53,21
16	Gorontalo	68,16	70,00	68,71
17	Palu	59,13	67,00	61,49
18	Ternate	54,18	66,00	57,73
19	Manokwari	65,13	64,00	64,79
20	Timika	50,13	65,00	54,59
21	Merauke	60,17	54,00	58,32
	Total	3008,52		
	Rata rata	68,38		

- 2) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja. Pengukuran indikator kinerja ini merupakan hasil evaluasi SAKIP Basarnas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang meliputi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja.

Adapun hasil penilaian SAKIP Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Tahun 2022 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang mencakup aspek dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemen PANRB

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai 2022
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,98
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,65
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,76
d.	Evaluasi Internal	10	7,14
e.	Capaian Kinerja	20	16,33
	Nilai Hasil Evaluasi	100	72,86

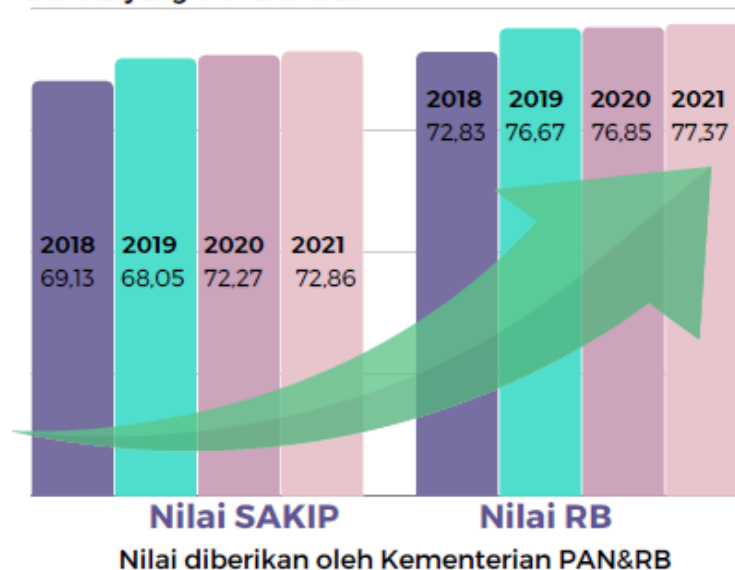
SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Laporan SAKIP terdiri

atas dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian.

Penyampaian dokumen SAKIP tepat waktu harus sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan (NSPK) yang berlaku. Dasar hukum penyusunan SAKIP diantaranya:

- a) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja;
- b) Peraturan Kementerian PANRB No 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja yang diperbarui dengan PermenPANRB no 6 Tahun 2022
- c) Peraturan Menteri PPN No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- d) Peraturan Kementerian PANRB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e) Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan No 4 Tahun 2016 tentang Implementasi Sistem SAKIP di lingkungan Badan SAR Nasional.

Basarnas telah menunjukkan arah penerapan SAKIP dan RB yang semakin baik



Gambar 3.1. Peningkatan Nilai SAKIP dan RB

Dokumen SAKIP yang disusun telah di sampaikan ke Kementerian PANRB melalui aplikasi e-SAKIP REVIU (esr.menpan.go.id).

Dokumen SAKIP tersebut diantaranya yaitu:

- a) Indikator Kinerja Utama
- b) Reviu Rencana Strategis
- c) Rancangan Rencana Strategis 2020-2024
- d) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/LKjIP)
- e) Perjanjian Kinerja Tahunan
- f) Rencana Kinerja Tahunan
- g) Rencana Aksi
- h) Pemantauan Rencana Aksi (TRIWULAN)

3) Nilai penguatan akuntabilitas kinerja

Pengukuran indikator ini merupakan bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melaksanakan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Dalam periode ini (2020-2024) pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Basarnas bertekad untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di lingkungan Basarnas, yang antara lain diwujudkan dengan menyusun Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 untuk memberikan pedoman dalam implementasi program reformasi birokrasi di lingkungan Basarnas, pembentukan *Agent of Change* dan pemilihan program *Quick Wins* tepat sasaran.

Sesuai dengan Surat Menteri PANRB Nomor: B/73/M.RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022, hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Basarnas Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB pada Tahun 2022 mendapatkan Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,37 dengan kategori BB. Berikut adalah rincian nilai indeks reformasi birokrasi tersebut.

Tabel 3.11 Hasil Evaluasi RB oleh Kemen PANRB

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	2022
A	Pengungkit		
	I. Pemenuhan	20,00	17,08
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,01
	III. Reform	30,00	20,54
Sub Total Komponen Pengungkit		60,00	43,63
B	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,06
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,72
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,39
4	Kinerja Organisasi	10,00	8,57
Sub Total Komponen Hasil		40,00	33,74
Indeks Reformasi Birokrasi		100,00	77,37

4) Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran

Pengukuran indikator kinerja ini merupakan nilai capaian pada aplikasi SMART. Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web dari Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi tersebut terintegrasi dengan aplikasi keuangan lainnya dan menyajikan informasi-informasi terkait realisasi anggaran, keluaran, capaian indikator keluaran, serta capaian indikator sasaran.

Pengisian aplikasi SMART-DJA dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja, tingkat unit eselon 1 sampai dengan tingkat lembaga. Selain itu aplikasi tersebut diisi secara berkala yaitu setiap bulan. Sehingga dari aplikasi tersebut DJA Kementerian Keuangan dapat melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran dari tiap-tiap kementerian dan lembaga.

Terkait Pemantauan pencapaian Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART), Biro Perencanaan telah melaksanakan

Pemantauan terhadap seluruh UPT dan Unit Kerja di kantor Pusat, baik pemantauan di Aplikasi, melalui *Virtual Meeting* maupun Monitoring langsung pada beberapa Kantor Unit Pelayanan Teknis sebagai uji petik. Hasil nilai kinerja pada aplikasi SMART Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah 93,33 pada Tahun 2022

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.12 Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73	68,38	93,67
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,5	72,86	103,35
	Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,85	8,06	102,68
	Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,33	99,29

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

- a) Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan capaiannya sebesar 93,67% dengan realisasi sebesar 68,38 dari target 73;

- b) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja capaiannya sebesar 103,35% dengan realisasi sebesar 72,86 dari target 70,5;
- c) Indikator Nilai Penguatan Akuntabilitas Kinerja capaiannya sebesar 102,68% dengan realisasi sebesar 8,06 dari target 7,85;
- d) Capaiannya sebesar 99,29%. Realisasi Indikator Nilai atas Evaluasi Kinerja Anggaran sebesar 93,33 dari target 94.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2019	NA	NA	NA
	2020	NA	NA	NA
	2021	70	71,84	102,30%
	2022	73	68,38	93,67
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	2019	70,3	62,51	88,91%
	2020	70,3	64,34	91,52
	2021	70,3	65,15	92,67%
	2022	70,5	72,86	103,35%
Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	2019	7,5	9,53	127,06
	2020	7,5	9,68	129,06
	2021	7,5	7,98	105,20%
	2022	7,85	8,06	102,68%
Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	2020	94	94,82	100,87%
	2021	94	93,8	99,79%
	2022	94	93,33	99,29%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

- a) Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menurun dari tahun sebelumnya.
 - b) Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - c) Indikator Nilai penguatan akuntabilitas kinerja capaiannya mengalami mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
 - d) Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran capaiannya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 2 (SK2)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2020	NA	NA	NA
	2021	70	71,84	102,30%
	2022	73	68,38	93,67%
	2023	73		
	2024	73		
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	2020	70,3	64,34	91,52
	2021	70,3	65,15	92,67%
	2022	70,5	72,86	103,35%
	2023	71,0		
	2024	71,5		
Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	2020	7,5	9,68	129,06
	2021	7,5	7,98	105,20%
	2022	7,85	8,06	102,68%
	2023	8,0		
	2024	8,2		
Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	2020	94		
	2021	94	93,8	99,79%
	2022	94	93,33	99,29
	2023	94	-	-
	2024	95	-	-

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Untuk indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan tidak ada standar nasional. Terkecuali untuk Nilai RB dan SAKIP, Basarnas perlu melaksanakan studi Banding dengan Lembaga lain untuk meningkatkan kualitas SDM dan melaksanakan inovasi inivasi guna perbaikan nilai RB dan SAKIP

- 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan untuk Tahun 2022 ada yang mengalami penurunan dan kenaikan. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
- Adanya sosialisasi pengisian aplikasi pemantauan kinerja yang merupakan salah satu kategori penilaian UPT.
 - Adanya asistensi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait dengan penyusunan dokumen SAKIP.
 - Pada Tahun 2022, Basarnas telah melaksanakan transformasi SKP, dari model bentuk DP3 menjadi format transformasi sesuai PermenPANRB no 8 Tahun 2021, melaksanakan, Dialog Kierja, Menyusun Matriks Peran Hasil, Cascading dan SKP Individu
 - Pada Akhir Tahun 2022 Basarnas juga telah menyesuaikan dengan adanya PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 terkait Penilaian BerAKHLAK dan adanya Capaian Kinerja Organisasi, Distribusi Capaian Kinerja dan SKP Individu
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Pemotongan anggaran sampai dengan 40% sangat berdampak pada efisiensi dan efektivitas capaian kinerja. Selama Tahun 2022 Biro Perencanaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
- Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.

- Pembinaan sumber daya manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi
 - Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas melalui Bimbingan TEknis maupun Belajar Mandiri
 - Mengoptimalkan sumber daya manusia.
 - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.
 - Pada Bulan Agustus samapi Desember 2022 Basarnas (Biro Perencanaan) telah banyak melaksanakan bimbingan Teknis Manajemen Kinerja ASN dalam meningkatkan kualitas ASN, khususnya dari KemenPAN RB, Kementrian LAN dan BPKP
- 7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan adalah sebagai berikut:
- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan
 - Rapat Kerja Basarnas
 - Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja
 - Penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja
 - Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan
 - Melaksanakan BenchMarking ke DKP Pemprov. Bandung terkait adanya aplikasi terkait SKP dan Manajemen Kinerja

Program Dukungan Manajemen sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian Perolongan. Beberapa Aktivitas selama Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1	Keg. Pengisian Aplikasi Pemanatauan Kinerja Anggaran Triwulan IV Tahun 2021	17-18 Jan 2022
2	Keg. Asistensi Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengisian Aplikasi Pemantauan Kinerja Anggaran	27 Juni - 1 Jul'22
3	Keg. Reivu Renstra dan Monitoring T.A. 2022 di Kansar Makasar	8-12 Ags 2022

4	Penyusunan Dokumen Evaluasi Program dan Rencana Aksi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Di Semarang	18 - 21 September 2022
5	Monitoring Ke Tanjung Pinang	26 - 28 Oktober
6	Keg. Pengisian & Verifikasi Aplikasi Pemantauan Kinerja Anggaran (SMART-DJA, Monev Bappenas dan Simonev) periode Tri. II Tahun 2022	18-21 Juli 2022
7	Penyusunan Laporan Bulanan dan Tahunan Kepada Presiden	29 AGUSTUS - 2 SEPTEMBER
8	Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi (RB) pokja Akuntabilitas dan Sakip	12 s.d. 16 September 2022
9	Keg. Reviu IKU UPT	4-7 Jan 2022
10	Keg. Asistensi Laporan Kinerja (LKj) Thn 2021 UPT Basarnas	19-22 Jan 2022
11	Keg.Penyusunan Dokumen Sakip Basarnas, Sekretaris Utama dan Biro Perencanaan Tahun 2021	8-11 Feb 2022
12	Keg.Penyusunan Laporan Triwulan IV Tahun 2021	12-14 Jan 2022
13	Keg.Penyusunan Laptah 2021	26-28 Jan 2022
14	Keg. Pemutakhiran Data Periode Triwulan I pada Aplikasi E-Performance Basarnas	17 -20 Mei 2022
15	Keg.Persiapan RAKER '2022	16-18 Feb 2022
16	Evaluasi RAKER 2022	15-18 Maret 2022

Beberapa Langkah strategis Basarnas dalam mendukung Indikator antara lain adalah:

Adanya reviu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2020–2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penyusunan Reviu Rencana Strategis

(Renstra) 2020–2024 dilakukan sebagai bentuk dukungan upaya perwujudan strategi yang akan diperbaharui. Hal tersebut merupakan bagian dari program generik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diharapkan dapat mendukung manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis lainnya di dalam organisasi Badan. Tujuannya adalah untuk menjawab rekomendasi Kementerian PANRB terkait Hasil Evaluasi AKIP Basarnas diantaranya:

1. Untuk mendokumentasikan dan memetakan dokumen dokumen laporan pelaksanaan renstra
2. Untuk menyusun rekomendasi yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Melakukan reviu untuk melihat dampak pemotongan anggaran sebagai justifikasi tidak tercapainya beberapa target renstra;
4. Menyesuaikan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan untuk dituangkan dalam matriks kinerja dan pendanaan tahun 2023-2024M;

3. Sasaran ketiga yaitu “Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga”

a. Capaian

Sasaran ini didukung oleh 3 indikator kinerja, yaitu Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA, Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program, serta Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting. Adapun capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.15 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%	100%	100%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan	100%	100%	100%

	UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program			
	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%

Dalam rangka mendukung sasaran di atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Bagian Rencana dan Program beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Indikator Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan rencana kerja yang baik dan benar dengan mengacu kepada arah kebijakan dan direktif presiden melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional diharapkan dapat meminimalisir blokir anggaran. Pemblokiran anggaran menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran. Beberapa penyebab anggaran masuk dalam Catatan Halaman IV DIPA atau dibintangi akibat kesalahan dalam perencanaan, antara lain data dukung yang kurang lengkap, proporsi anggaran yang kurang tepat, penelaahan dilakukan secara on-line dan waktu yang singkat, mengakibatkan penjelasan pada waktu pendalaman terhadap kegiatan-kegiatan yang disampaikan belum maksimal. Tujuan dari pengukuran indikator ini yaitu Untuk mengetahui sejauh mana unit kerja dan UPT menerapkan peraturan terkait pengusulan

anggaran unit kerja dan UPT antara lain berupa kelengkapan data dukung dan dokumen lain yang diperlukan dalam pengusulan anggaran.

- 2) Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program Penyusunan RKA-KL dimulai dengan penyusunan Pagu Kebutuhan, yang merupakan penggambaran kebutuhan anggaran dari masing-masing UPT dan digabungkan oleh Biro Perencanaan mengacu pada Renstra dan RKP. Kemudian dilanjutkan dengan Pagu Indikatif yang merupakan indikasi awal kebutuhan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai ditahun yang akan datang.

Selanjutnya disusun Pagu Anggaran yang merupakan rincian anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN. Sebelum dikeluarkan Pagu Alokasi Anggaran maka dilakukan Trilateral Meeting kedua untuk memastikan anggaran yang diberikan mempunyai komposisi yang pas dalam membiayai kegiatan pemerintah. Pagu Alokasi Anggaran merupakan kegiatan akhir dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL). Pagu Alokasi Anggaran merupakan acuan dalam penyusunan APBN di tahun yang akan datang.

KRISNA merupakan singkatan dari “Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran”. Sistem Informasi Krisna digunakan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran serta pelaporan informasi kinerja. Saat ini Krisna memiliki 10 sub sistem di dalamnya, termasuk Krisna-Renja K/L yang digunakan untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L).

Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Kementerian/ Lembaga dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) serta disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja K/L memuat substansi :

- Visi dan Misi;
- Sasaran : Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan;
- Program : Program Spesifik/ Program Lintas;
- Kegiatan : Kegiatan Spesifik/ Kegiatan Lintas;
- Output : KRO dan RO;
- Lokasi;
- Komponen dan Indikasi Pendanaan.

Tahapan penyusunan Renja K/L :

- Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L;
- Penyusunan Rancangan Renja K/L;
- Pemutakhiran Rancangan Renja K/L.

Melalui Sistem Informasi Krisna, Renja K/L disusun dan ditelaah serta menjadi referensi dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-K/L)

Proses penyusunannya terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

- Penyusunan RKA-K/L Pagu Kebutuhan;
- Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif;
- Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran; dan
- Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran

- 3) Indikator Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting

Dalam proses perencanaan kegiatan dan anggaran harus melalui kegiatan Trilateral Meeting. Trilateral Meeting atau pertemuan tiga pihak adalah forum untuk mengsinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana program dan kegiatan K/L yang dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA K/L dan APBN. Trilateral Meeting tersebut dihadiri oleh Basarnas, Kementerian Keuangan dan Bappenas.

b. Analisis Capaian untuk Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

Penjabaran dari masing-masing analisis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.16 Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%	100%	100%
	Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100%
	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan lembaga telah mencapai targetnya.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	2020	98%	100%	102,04%
	2021	98%	99,99%	102,03%

	2022	100%	100%	100%
Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	2019	100%	100%	100%
	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%

Dari tabel perbandingan di atas dapat dilihat bahwa capaian dari indikator-indikator kinerja yang mendukung sasaran Meningkatkan evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan:

- a) Capaian Indikator Persentase anggaran yang tidak tercantum dalam catatan halaman IV DIPA pada Tahun 2022 sesuai target. Artinya kelengkapan administrasi pengajuan anggaran telah dilaksanakan lengkap administrasi
- b) Indikator Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program target tercapai baik Tahun 2022 maupun tahun sebelumnya.
- c) Indikator Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting target tercapai baik Tahun 2022 maupun tahun sebelumnya.

- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Sasaran Kegiatan 3 (SK3)

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	2020	98%	100%	102,04%
	2021	98%	99,99%	102,03%
	2022	98%	100%	100%
	2023	98%		
	2024	98%		
Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
dokumen usulan rencana dan program	2022	100%	100%	100%
	2023	100%		
	2024	100%		
Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%		
	2024	100%		

- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional Untuk indikator-indikator kinerja yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan lembaga tidak ada standar nasional.
- 5) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan Untuk pencapaian sasaran kinerja Meningkatkan kualitas perencanaan lembaga untuk Tahun 2021 relatif realisasinya memenuhi target. Berikut penyebab keberhasilan/kenaikan realisasi kinerja dan capaian kinerja untuk indikator tersebut:
 - dilaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengajuan RKA-KL
 - dilaksanakan sosialisasi terkait pengisian aplikasi RKA-KL
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Selama Tahun 2022 Biro Perencanaan telah melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan sumber daya antara lain:
 - Pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi.
 - Pembinaan sumber daya manusia yang berjenjang sebagai sarana regenerasi/refreshment di Basarnas.
 - Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas.
 - Mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada.
 - Menggunakan sarana dan prasarana kantor salah satunya peralatan pengolah data seperti laptop dengan baik.

7) Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga adalah sebagai berikut:

- Penyusunan RKAKL Basarnas
- Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas

Kegiatan rapat koordinasi dibidang perencanaan adalah rapat yang dilaksanakan Basarnas dengan Lembaga Legislatif yaitu Komisi V DPR RI serta Kementerian/ Lembaga, TNI POLRI, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan antar internal Basarnas, Basarnas dengan Instansi pemerintah terkait dan Basarnas dengan Komisi V DPR RI. Kegiatan ini sangat penting untuk mencatat usulan, saran dan masukan bagi Basarnas yang dapat digunakan sebagai dasar kebijakan peningkatan rencana kerja di waktu yang akan datang

Kegiatan eksklusif di Biro Perencanaan di Tahun 2022 dalam upaya meningkatkan Prioritas nasional (PN) yang alokasinya tergerus oleh adanya *Automatic Adjustment* antar Lain

1. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) Tahun 2020-2024.

Kegiatan Basarnas Tahun 2022 dalam mendukung STRANAS PPDT Tahun 2020-2024 adalah pembinaan potensi SAR di 8 Kabupaten tertinggal. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Keerom, Kepulauan Tanimbar, Seram Bagian Barat, Sumba Timur Atambua dan Tojo Una-una. Kegiatan yang dapat direalisasikan hanya pada 3 kabupaten yaitu Kabupaten Teluk Binyuni, Sumba Timur dan Atambua. Sedangkan kegiatan pada 5 kabupaten lainnya tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing, pemindahan lokasi dan perubahan waktu pelaksanaan.

2. Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)

Basarnas mengusulkan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri berupa Pesawat Helikopter Pencarian dan Pertolongan Kelas Medium dan Rigid Buoyancy Boat (RBB) dalam DRPPLN/Green Book Tahun 2022. Basarnas telah mengirimkan kriteria kesiapan pengadaan pesawat helikopter pencarian dan pertolongan kelas medium dan RBB ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappenas sebagai bahan pertimbangan. Rapat mengenai usulan Basarnas tersebut telah dilaksanakan secara intens. Saat ini, kami masih menunggu keluarnya Daftar Kegiatan (DK) dari Bappenas. DK tersebut akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR (DJPPR) Kementerian Keuangan untuk proses penetapan Sumber Pembiayaan (SP).

3. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan UU No 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, disampaikan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan SDM di bidang Pencarian dan Pertolongan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut memerlukan sarana, prasarana dan teknologi yang memadai untuk penyelenggaraan pelatihan bagi SDM Pencarian dan Pertolongan yang berasal dari Basarnas, instansi/organisasi potensi SAR maupun masyarakat. Basarnas mengusulkan kegiatan pembangunan fasilitas Balai Pendidikan dan Pelatihan Basarnas berupa Water Rescue Simulator yang dibiayai melalui SBSN. Lokasi Balai Diklat Basarnas di Jl Jonggol-Cariu Bogor. Data dukung berupa Detailed Engineering Design (DED) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sudah dibahas dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa usulan Basarnas tersebut belum dapat direalisasikan Tahun 2023.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun Anggaran 2022, Biro Perencanaan mendapatkan pagu awal sebesar Rp.9.302.643.000,- yang terdiri dari :

- a. Layanan Kerjasama dalam dan Luar Negeri Rp.2.963.322.000,-
- b. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Rp.3.587.321.000,-
- c. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Rp.2.491.000.000,-

Biro Perencanaan Basarnas mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp.3.499.168.000,- (hampir 40%) sehingga pagu setelah AA menjadi Rp.5.542.475.000 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 adalah Rp.5.524.111.342,- (99,67%)

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Per Kegiatan / Aktivitas dalam Rencana Aksi

SASARAN KEGIATAN/ AKTIVITAS	NO	KEGIATAN/ AKTIVITAS	PAGU (Rp.)	PAGU (Rp.) REVISI / AA	REALISASI KEUANGAN
Meningkatnya kerja sama di bidang Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan Kerja Sama Dalam Negeri				
	1	Penyelenggaraan pertemuan kerja sama SAR dalam negeri	420.000.000	193.277.000	193.254.230
	2	Workshop Kerjasama SAR Dalam Negeri	300.000.000	129.017.000	128.885.141
	3	Penyusunan Dokumen Kerjasama SAR	280.000.000	456.653.000	452.633.348
	4	Penyusunan Juknis tentang Kerja Sama	169.000.000	79.244.000	79.216.021
	5	Penyelenggaraan Pertemuan Kerjasama SAR Luar Negeri	409.322.000	224.268.000	221.536.655
	6	Workshop Kerjasama SAR Luar Negeri	450.000.000	129.328.000	128.163.966
	7	Penyelenggaraan Regional Meeting (INSARAG)	935.000.000	172.916.000	169.759.947
Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				
	1	Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	695.000.000	539.000.000	537.304.588
	2	Penyusunan Lakip dan Penetapan Kinerja	600.000.000	325.800.000	325.775.465
	3	Penyusunan Laporan Evaluasi Kegiatan	696.000.000	206.900.000	206.276.060
	4	Rapat Kerja Basarnas	500.000.000	444.200.000	444.198.400
Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Penyusunan Rencana Kerja				
	1	Rapat Koordinasi Perencanaan Basarnas	804.000.000	739.657.000	738.480.430
	2	Reviu Renstra	600.000.000	569.808.000	569.440.750

3	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL (RKA-KL)	1.438.870.000	1.332.407.000	1.329.186.341
4	Sosialisasi Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran	407.088.000		
5	Pembinaan Aparatur Perencanaan	337.363.000		
TOTAL		9.041.643.000	5.542.475.000	5.524.111.342

BAB IV | PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara garis besar tingkat capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 dapat dikatakan memuaskan dengan rata-rata capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama sebesar 99.87%. Namun terdapat beberapa indikator kinerja yang realisasinya tidak memenuhi target, yaitu 2 indikator dari 8 indikator. Indikator yang tidak memenuhi target adalah Indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Capaian 99,67%), serta Indikator Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART Direktorat Jenderal Keuangan) dengan Capaian 99.29%. Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Biro Perencanaan pada khususnya dan pada Basarnas pada umumnya.

B. CAPAIAN TERKAIT MANAJEMEN KINERJA ASN

Basarnas memperoleh penghargaan pada saat BKN Award Tahun 2022. Penghargaan tersebut didapat untuk katagori:

1. Juara Pertama untuk Katagori Manajemen ASN Terbaik
2. Juara Keempat untuk Katagori Penerapana Manajemen Kinerja

Hasil kerja ini adalah Kolaborasi antara Biro Perencanaan terkait Rencana Strategis dan Indikator Kinerja dan Biro Kepegawaian dan Hukum terkait Penyusunan SKP sesuai dengan PermanPANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja ASN yang diperbarui dengan PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022.



Gambar 4.1 Katagori Manajemen Kinerja dan Implementasinya

C. TRANSFORMASI SKP

Di dalam PP 46/2011 Jo Perka 1 Tahun 2013, SKP memuat kegiatan tugas jabatan berbasis aktivitas dan merupakan penyusunan kegiatan tugas jabatan berdasarkan tugas dan fungsi. Di dalam PP 30/2019 jo PERMENPANRB Sistem Manajemen Kinerja PNS SKP memuat

1. Kinerja Utama Individu: Penjabaran kinerja berdasarkan *cascading* berbasis hasil berdasarkan dialog kinerja
2. Indikator Kinerja Individu: Memperhatikan Kriteria Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi

Periode Transisi Kinerja Pegawai Tahun 2021 (SE Menpan No 3/2021) PP 46/2011 jo. Perka BKN 1/2013 dipakai untuk menyusun **SKP Januari – Juni 2021**. PP 30/2019 jo PermenPANRB SMK PNS disusun untuk penyusunan **SKP Juli – Desember 2021**

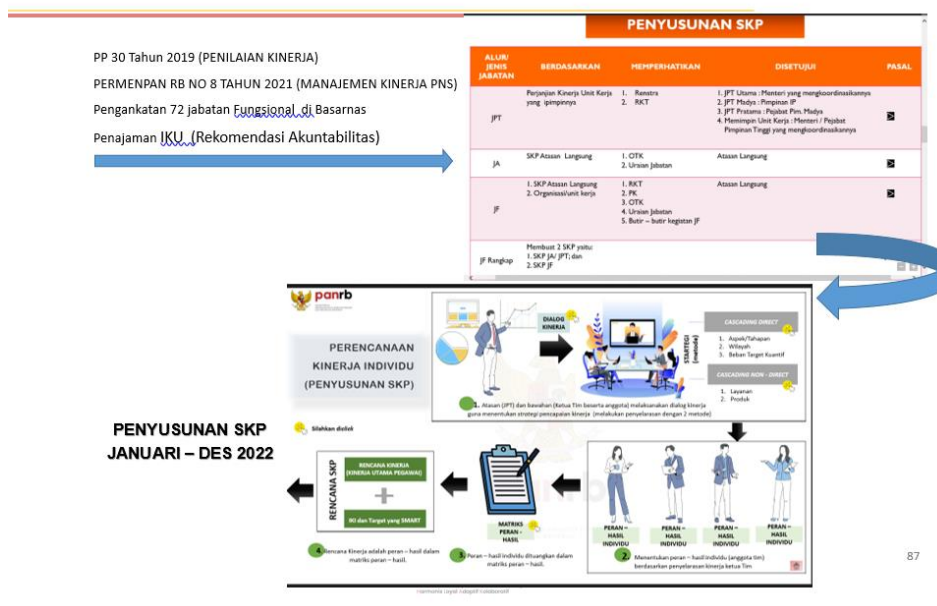
- Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), SKP disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan memperhatikan Renstra dan RKT
- Untuk Jabatan Administrasi, SKP disusun berdasarkan SKP Atasan Langsung dengan memperhatikan OTK dan Uraian Jabatan
- Untuk Jabatan Fungsional, SKP disusun berdasarkan SKP Atasan Langsung dan Organisasi/unit kerja dengan memperhatikan RKT, PK, OTK, Uraian Jabatan dan butir-butir kegiatan JF

- Untuk Jabatan Fungsional yang merangkap Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi atau jabatan lainnya, SKP disusun mengikuti jabatan JPT, JA atau Jabatan lainnya dan dapat menyusun SKP JF;

Dalam menyusun SKP Januari-Desember 2022 tersebut seluruh Unit Kerja di lingkungan Basarnas telah memulai langkah langkah sebagai berikut:

- Melaksanakan Dialog Kinerja dan menuangkannya ke dalam MyMap
- Menuangkan ke dalam Matrik Peran Hasil
- Dari Uraian pada matrik tersebut dijadikan Indikator Kinerja Individu / Butir butir kegiatan yang tertuang ke dalam SKP

Untuk jabatan Fungsional disesuaikan dengan Butir butir Kegiatan Angka Kredit sesuai Instansi pembina Jabatan Fungsional



Gambar 4.2 Impelementasi Penyusunan SKP

D. UPAYA PERBAIKAN CAPAIAN KINERJA

Menindaklanjuti hasil pengukuran capaian kinerja pada Biro Perencanaan, untuk indikator kinerja yang realisasinya telah memenuhi target seluruh bidang di lingkungan Biro Perencanaan akan melaksanakan program dan kegiatan yang lebih baik sehingga keberhasilan pencapaian kinerja tersebut dapat

dipertahankan dan diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Sedangkan untuk indikator kinerja yang realisasinya belum memenuhi target, Biro Perencanaan akan mencoba menerapkan program dan kegiatan yang lebih baik lagi.

Untuk peningkatan capaian kinerja pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja perlu:

- Dilaksanakannya diklat/bimtek penyusunan dokumen AKIP dan Manajemen Kinerja
- Asistensi terkait penyusunan dokumen AKIP/SKP lebih baik lagi dengan pemantauan TRIWULAN
- Pengembangan Aplikasi E Performance dan SKP Berbasis Aplikasi
- Melaksanakan *Bench Marking* dengan Lembaga lain yang lebih baik Kinerjanya

Selain itu sebagai pendukung dalam tugas pelayanan pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Basarnas, maka Biro Perencanaan perlu terus meningkatkan pelaksanaan tugasnya dengan lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan kerja sama dengan unsur-unsur lainnya baik di lingkungan Biro Perencanaan maupun di lingkungan Basarnas lainnya serta instansi/organisasi lain. Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga kinerja Biro Perencanaan secara keseluruhan dapat berlangsung secara maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2022 ini disusun. Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Biro Perencanaan dan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana kinerja, rencana anggaran dan rencana strategis dimasa yang akan datang. Biro Perencanaan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Biro Perencanaan Basarnas.

Daftar Pustaka

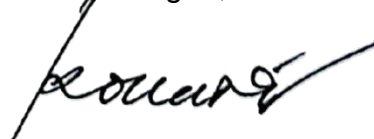
- Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Jakarta.
- Indonesia. 2014. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186*. Jakarta.
- Indonesia. 2016. *Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Indonesia. 2017. *Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2021 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor SP-DIPA-107.01/2021 Tahun 2021*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP*. Jakarta.
- Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 BIRO PERENCANAAN

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK.1. Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	1. Persentase kerja sama di bidang SAR	100%	100%	100
SK.2. Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	2. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	73,00	68,38	93,67
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Capaian Kinerja	70,5	72,86	103,35
	4. Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,85	8,06	102,68
	5. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94	93,33	99,29
SK.3. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	6. Persentase anggaran yang tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%	100%	100
	7. Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%	100%	100
	8. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting	100%	100%	100
RATA RATA CAPAIAN				99,87

Pagu Anggaran : Rp. 9.041.643.000,-
 Pagu setelah AA : Rp. 5.542.475.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 5.524.111.342,- (99,67%)

Jakarta, Februari 2023
 Kepala Biro Perencanaan
 dan Keuangan,



Roy Romanza. S.I.P
 Marsekal Pertama TNI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Barokna Haulah
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS.
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)

Jakarta, Januari 2022
Pihak Pertama

Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BIRO PERENCANAAN**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	100%
2.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT	73%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan dan Capaian Kinerja	70,5
		Nilai penguatan akuntabilitas kinerja	7,85
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan Lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dan dokumen Trilateral Meeting	100%

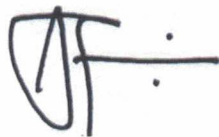
Pagu Anggaran

: Rp9.302.643.000,-

Jakarta, Januari 2022

Sekretaris Utama

Kepala Biro Perencanaan




Dr. Abdul Haris Achadi, S.H., DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)

Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022
BIRO PERENCANAAN**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	Persentase kerja sama di bidang pencarian dan petolongan	100%
2.	Meningkatnya evaluasi kelembagaan dalam pengelolaan kinerja dan keuangan	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk Aspek Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan dan Capaian Kinerja	70,5
		Nilai akuntabilitas kinerja	7,85
		Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	94
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	Persentase anggaran yang masih tercantum dalam catatan halaman IV DIPA	100%
		Persentase ketepatan waktu pada seluruh Unit Kerja dan UPT dalam menyampaikan dokumen usulan rencana dan program	100%
		Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dan dokumen Trilateral Meeting	100%

Jakarta, Januari 2023
Kepala Biro Perencanaan



Moh. Barokna Haulah
Pembina Utama Muda (IV/c)